

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA  
PULAU LAWAS KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG  
KABUPATEN KAMPAR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



**OLEH:**

**MELDA AFRI YULIEDTA**

**155310558**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
Telp.(0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU - 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MELDA AFRI YULIEDTA  
NPM : 155310558  
FAKULTAS : EKONOMI  
JURUSAN : AKUNTANSI-S1  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA  
DESA PULAU LAWAS KECAMATAN BANGKINANG  
SEBERANG KABUPATEN KAMPAR

**Disahkan Oleh:**

**PEMBIMBING**

Hariswanto., SE., M.Si., Ak., CA., CPA

**Mengetahui :**

DEKAN

KETUA PRODI AKUNTANSI S1

Drs. H. Abrar, M.Si.,AK.,CA

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si.,AK.,CA

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL  
ACCOUNTING IN THE VILLAGE OF LAWAS ISLAND, BANGKINANG  
DISTRICT, KAMPAR DISTRICT**

**ABSTRACT**

**BY: MELDA AFRI YULIEDTA**

**155310558**

The purpose of this study was to determine whether the Accounting Application conducted by Pulau Lawas Village, Bangkinang Seberang District, Kampar Regency was in accordance with the 2015 Financial Accounting Assistance Guidelines for IAI-KASP Village. lane balance and balance sheet. Furthermore, the old island villages in the presentation of the Village Ownership Report where the fixed assets that have a useful life of more than a year are not calculated accumulated depreciation, so the value of fixed assets does not indicate the true value. In addition, in the Village Assets Report the total assets acquired in 2017 were not reported in the Village Assets Report in 2018.

In this study the authors used a descriptive method by comparing practice and existing theories, data collection techniques in this study using interviewing, documentation and observation techniques.

The results of this study indicate the Application of Financial Accounting in Pulau Lawas Village, Bangkinang Seberang District, Kampar Regency is not fully in accordance with the 2015 IAI-KASP Village Financial Accounting Assistance Guidelines.

Keywords: Accounting Cycles and Reports of Village Ownership

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA  
PULAU LAWAS KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG  
KABUPATEN KAMPAR**

**ABSTRAK**

**OLEH: MELDA AFRI YULIEDTA**  
**155310558**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Penerapan Akuntansi yang dilakukan oleh Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP Tahun 2015. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa masalah yaitu Desa Pulau Lawas belum menyajikan buku besar, neraca saldo dan neraca lajur. Selanjutnya desa pulau lawas dalam penyajian Laporan Kekayaan Milik Desa dimana aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari setahun tidak dihitung akumulasi penyusutannya, sehingga nilai aset tetap tidak menunjukkan nilai sebenarnya. Selain itu, dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah aset yang diperoleh tahun 2017 tidak dilaporkan pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan membandingkan antara praktek dan teori yang ada, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi serta observasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP Tahun 2015.

Kata kunci : Siklus Akuntansi dan Laporan Kekayaan Milik Desa



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kurnia, nikmat serta kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar”. Shalawat beserta salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti ini, yakni agama islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya pada yaumul akhir kelak aamiin. Penyusunan Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan dukungan atau masukan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setingginya kepada:

1. Keluarga besar penulis Mama Yulhaidah, S.Pd serta Kakek Zakaria serta Nenek Nursiah, terimakasih atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, motivasi dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
2. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibuk Dra. EnyWahyuningsih, M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau

4. Bapak Hariswanto, SE., M.Si.,Ak.,CA.,CPA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, motivasi, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun Skripsi ini.
5. Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau terutama abang Tengku Khairul Amri yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dan proses pembuatan izin penelitian.
6. Terimakasih penulis ucapkan kepada pihak yang terkait dalam proses penelitian yaitu bapak Kepala Desa Andri Nuras, SH, Kakak Rossa Lina, S.Pd selaku bendahara desa yang selalu memberikan pelayanan yang ramah pada saat penulis mengambil laporan keuangan dan data dalam proses penelitian.
7. Untuk Ibu Er, Paman Nga, Paman do, Paman Ipen dan saudara yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terimakasih atas segala perhatian, kasih sayang, motivasi, support, dan segala doanya.
8. Sahabatku dari grup “Tolong Ubah Nama Grup” Alfin, Caca, Ejak, Gugus, Ipong, Kina, Inop, Oye, Opung, Shinta, Ulfa serta sahabatku dari grup “ACA” Maya, Tika, Reta, Ican terimakasih atas dukungan, dorongan serta selalu menghibur saya saat lelah.
9. Sahabat-sahabatku angkatan 15 yaitu Yola, Nanad, Aci, Kak Ami, Caei, Piak, Desi, anggota grup “Siak Raun-Raun” dan semua yang terlibat dalam pembuatan skripsi terimakasih atas segala saran, dorongan, dan kesabaran dalam menghadapi kepanikan penulis serta emosi yang tidak bisa diredam saat penulis menyelesaikan skripsi ini.. Terimakasih juga untuk teman-teman

seperjuanganku mahasiswa bimbingan pak Haris yaitu Lian, Nizam dan Dika untuk semangat serta kesabaran kalian menghadapi penulis pada masa-masa terberat dalam penulisan skripsi. Semoga kita semua saling mendukung dalam keadaan terbaik maupun keadaan terburuk kita.

10. Semua pihak yang begitu baik mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin ya robbal'alamiin.

Pekanbaru, September 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II : TELAAH PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
<b>A. Telaah Pustaka</b> .....	<b>9</b>
1. Definisi Akuntansi .....	9
2. Defenisi Desa.....	10
3. Defenisi Akuntansi Desa .....	11
4. Aspek-Aspek Dan Karakteristik Akuntansi .....	11
5. Penggunaan Akuntansi Desa .....	12
6. Prinsip-Prinsip Akuntansi .....	13
7. Siklus Akuntansi Keuangan Desa .....	14
8. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) .....	15
9. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan	



Akuntansi Keuangan Desa.....	16
10. Pengelolaan Keuangan Desa .....	18
11. Asas Pengelolaan Keuangan Desa .....	21
12. Tujuan Laporan Keuangan .....	21
B. Hipotesis .....	21
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Lokasi Penelitian .....	23
B. Jenis Data Dan Sumber Data .....	23
C. Teknik Pengumpulan Data .....	23
D. Teknik Analisis Data .....	24
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM DESA PULAU LAWAS .....</b>	<b>25</b>
A. Sejarah Singkat Desa Pulau Lawas .....	25
B. Kondisi Geografis.....	27
C. Struktur Organisasi Desa Pulau Lawas .....	28
D. Visi Dan Misi Desa Pulau Lawas .....	30
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Dasar pencatatan Akuntansi .....	32
B. Proses Akuntansi Desa Pulau Lawas.....	32
C. Penyajian Laporan Keunagan.....	45
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

TABEL VI.1 Struktur Organisasi Desa Pulau Lawas .....	29
TABEL V.1 Buku Kas Umum .....	33
TABEL V.2 Buku Besar .....	35
TABEL V.3 Buku Besar Pembantu .....	35
TABEL V.4 Buku Besar .....	35
TABEL V.5 Buku Besar Pembantu .....	35
TABEL V.6 Buku Kas Pembantu Pajak .....	36
TABEL V.7 Buku Bank .....	37
TABEL V.8 Buku Kas Pembantu Kegiatan.....	38
TABEL V.9 Neraca Saldo.....	41
TABEL V.10 Neraca Lajur .....	43
TABEL V.11 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.....	46
TABEL V.12 Laporan Kekayaan Milik Desa.....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Buku Kas Umum
- Lampiran 2 Buku Kas Pembantu Pajak
- Lampiran 3 Buku Bank Desa
- Lampiran 4 Buku Kas Pembantu Kegiatan
- Lampiran 6 Buku Inventaris Desa
- Lampiran 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- Lampiran 9 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa
- Lampiran 10 Laporan Kekayaan Milik Desa

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sector pertanian.

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.”

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai



penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa juga merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer Desa didalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada desa. Prioritas penggunaan dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Akuntansi desa adalah pencatatan yang dilakukan oleh desa, dimana bermula dari pengumpulan bukti transaksi yang terjadi didesa, setelah itu dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan mendapatkan informasi akuntansi yang akan digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa adalah masyarakat desa, perangkat desa, pemerintahan daerah, pemerintahan pusat.

Pelaksanaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 “tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 212 ayat (2) menyatakan bahwa hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.”

Dengan demikian menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 “pengertian pengelolaan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 “laporan keuangan desa yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa 1)Anggaran 2)Buku Kas 3)Buku Pajak 4)Buku Bank 5)Laporan Realisasi Anggaran (LRA)”

Proses akuntansi berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP,2015) “tentang pedoman asistensi akuntansi keuangan desa itu dimulai dari yang pertama tahap pencatatan,tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi, berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai. Tahap yang kedua yaitu tahap penggolongan, tahap penggolongan ini merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengikhtisaran, pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Dan tahap yang ke empat adalah tahap pelaporan, tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah 1) membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, 2) Laporan Kekayaan Milik Desa.”

Proses akuntansi yang dilakukan pada desa pulau lawas ini sudah menggunakan system yang terkomputerisasi yaitu menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Desa Pulau Lawas ini pertama kali membuat proses perencanaan dan penganggaran desa untuk menetapkan dan menyusun kegiatan dimasa yang akan datang. Perencanaan pembangunan desa ini terdiri dari penyusunan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yaitu rencana kegiatan desa untuk jangka waktu 6 tahun, dan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 tahun yang dituangkan dalam penyusunan anggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lampiran 6) dalam pelaksanaan anggaran tersebut maka akan timbul transaksi. Kemudian dari transaksi tersebut di input secara terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi sitem keuangan desa (SISKEUDES) agar pencatatan lebih terperinci dan akurat. Penginputan data transaksi yang berkaitan dengan penerimaan desa maupun pengeluaran desa yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan desa akan menghasilkan Buku Kas Umum Desa (Lampiran 1) digunakan untuk mencatat semua transaksi baik itu penerimaan dan pengeluaran kas. Setelah itu membuat Buku Pajak (Lampiran 2) yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Lalu membuat Buku Bank (Lampiran 3) yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Selanjutnya membuat Buku Kas Pembantu Kegiatan (Lampiran 4) yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan yang berhubungan dengan kas saja. Setelah itu desa pulau lawas

membuat Buku Inventaris Desa (Lampiran 5) yaitu digunakan untuk mencatat barang-barang yang dimiliki desa.

Kemudian Desa Pulau Lawas membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (Lampiran 7) yang digunakan untuk memperoleh informasi posisi keuangan. Terakhir desa pulau lawas membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 8). Semua pencatatan yang dilakukan menggunakan dasar pengakuan Cash basis, yaitu proses pencatatan akuntansi dimana biaya dicatat pada saat mengeluarkan kas dan penerimaan dicatat pada saat kas diterima.

Berdasarkan proses akuntansi selama ini yang dilakukan Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang terdapat beberapa permasalahan, yaitu Desa pulau lawas belum menyajikan buku besar, neraca saldo, dan neraca lajur. Selanjutnya desa pulau lawas dalam penyajian Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 8) dimana aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari setahun tidak dihitung akumulasi penyusutannya, sehingga nilai aset tetap tidak menunjukkan nilai sebenarnya. Selain itu, dalam Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 8) jumlah aset yang diperoleh tahun 2017 tidak dilaporkan pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA PULAU LAWAS KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR”**



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimanakah kesesuaian penerapan akuntansi keuangan pada desa pulau lawas kecamatan bangkinang seberang kabupaten kampar sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP Tahun 2015.”

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi keuangan pada desa Pulau lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP Tahun 2015.

Sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Penulis**

Dapat menambah wawasan dalam hal penerapan prinsip-prinsip akuntansi desa dalam pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian laporan keuangan Desa Pulau Lawas.

### **2. Bagi Kantor Desa Pulau Lawas**

Manfaat penelitian bagi Desa Pulau Lawas yaitu mengetahui manfaat dari penerapan akuntansi beserta proses akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa yang baik yang nantinya akan menjadikan Desa Pulau Lawas sebagai desa yang baik dalam penerapan pembuatan laporan keuangan desanya dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain.

### 3. Bagi Peneliti Lanjutan

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian yang sejenis yang dapat dijadikan sebagai pembanding bagi penelitian lebih lanjut terhadap materi yang sama sehingga penelitian ini dapat di sempurnakan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi enam bab yaitu :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Bab ini menjelaskan telaah pustaka yang berhubungan dengan penulisan dan hipotesis serta mengemukakan konsep operasional penelitian.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini dijelaskan tentang lokasi penelitian operasional variable penelitian, populasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

##### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

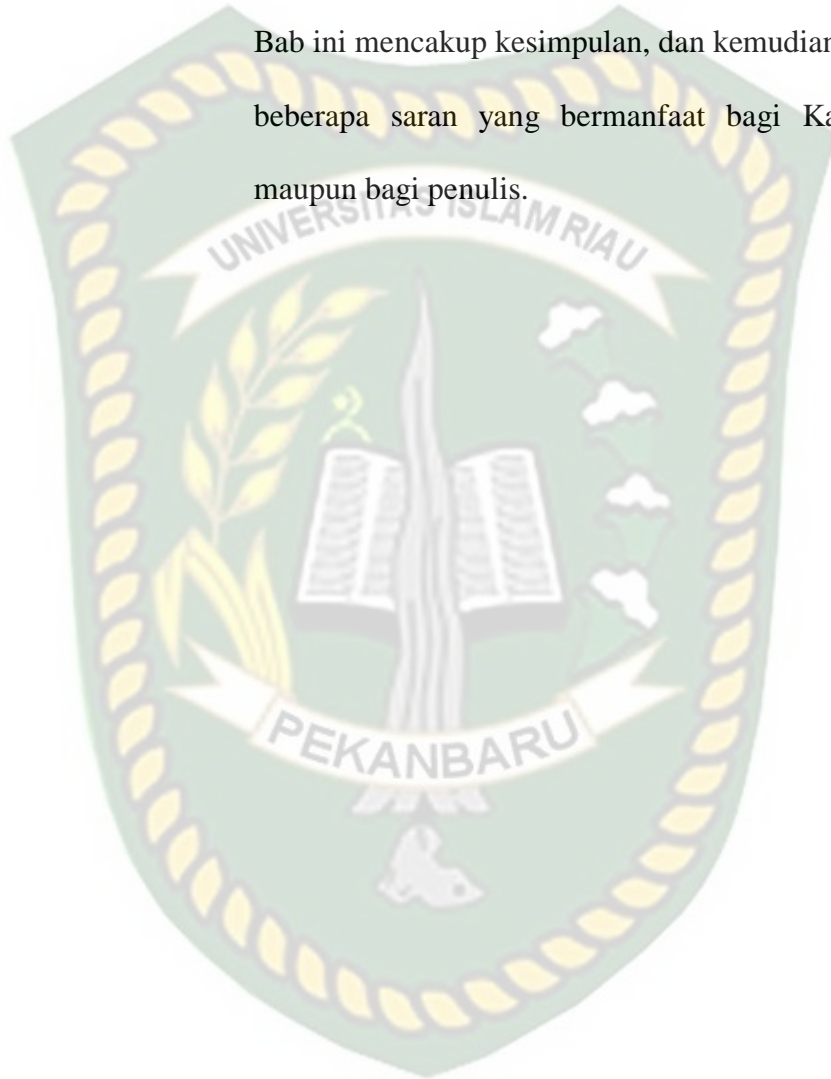
Dalam Bab ini dikemukakan tentang gambaran umum Kantor Desa Pulau Lawas.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas dan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini mencakup kesimpulan, dan kemudian di berikan beberapa saran yang bermanfaat bagi Kantor Desa maupun bagi penulis.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. Defenisi Akuntansi

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasi, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan (sujarweni, 2015:1).

Menurut Purba (2014:3) secara umum, akuntansi dapat didefenisikan sebagai:

Akuntansi sebagai seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara yang sepatutnya dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian yang setidaknya-tidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan serta penginterpretasian hasil dari pencatatan tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun (2010) pasal 1 ayat 2 akuntansi adalah:

“proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.”

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada delapan macam yaitu:

1. Akuntansi Keuangan (Financial Accounting) Adalah bidang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk semua pihak terutama pihak-pihka dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan bersifat serbaguna.
2. Akuntansi Manajemen (Management Accounting) Adalah akuntansi yang digunakan untuk memberikan informasi bagi manajemen agar manajemen



dapat mengambil sebuah keputusan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan.

3. Akuntansi Biaya (Cost Accounting) Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (Auditing) Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya secara obyektif.
5. Sistem Akuntansi (Accounting System) Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
6. Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting) Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Akuntansi Anggaran (Budgeting) Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan pengawasannya.
8. Akuntansi Organisasi Nir laba (Non Profit Accounting) Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain.

## 2. Pengertian Desa

Menurut Hanif (2011:2) desa merupakan :

Suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relative sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Menurut Permendagri no 113 Tahun 2014 desa adalah:

“Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian (Edi Indrizal, 2006).

### **3. Defenisi Akuntansi Desa**

Menurut Sujarweni (2015:17) mengatakan bahwa Akuntansi Desa adalah :

Pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Desa adalah suatu proses pencatatan transaksi yang terjadi di desa disertai dengan bukti-bukti transaksi yang akan disajikan dalam laporan keuangan desa untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan desa tersebut.

### **4. Aspek-Aspek dan Karakteristik Akuntansi**

Menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI-KASP, 2015 : 6) adapun aspek-aspek dari akuntansi sebagai berikut:

1. “Aspek Fungsi  
Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas ( misalnya pemerintahan desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan,

pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (misalnya kepala desa) yang dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

2. Aspek Aktivitas

Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Karakteristik penting akuntansi, meliputi :

- a. Pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan.
- b. Akuntansi sebagai suatu system dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.
- c. Informasi keuangan terkait suatu entitas
- d. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai dalam pengambilan keputusan

### 5. Penggunaan Akuntansi Desa

Menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI-KASP, 2015 : 6-7) Pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi akuntansi adalah:

a. Pihak Internal

Pihak internal adalah pihak yang berada didalam struktur organisasi Desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.

c. Pemerintah

Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota mengingat bahwa anggaran Desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil dan bantuan keuangan.



d. Pihak Lainnya

Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak-pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, dan sebagainya.”

## 6. Prinsip-Prinsip Akuntansi

Menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI-KASP, 2015 : 7-8):

“Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun, pada kenyataannya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal itu dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal untuk membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah Desa lainnya.

Ada beberapa prinsip akuntansi yang digunakan:

a. Prinsip harga perolehan

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (aset), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank.

b. Prinsip Realisasi Pendapatan

Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (aset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintah Desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.

c. Prinsip Objektif

Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

d. Prinsip Pengungkapan Penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan desa hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.



e. Prinsip konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.”

## 7. Siklus Akuntansi Keuangan Desa

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 dalam buku praktek, Siklus akuntansi terdiri dari 4 tahap yaitu “Tahap Pertama, pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Tahap Kedua, transaksi yang timbul dari Desa, setelah anggaran dan pendapatan Desa di sahkan dan akan dilaksanakan disertai bukti-bukti berupa nota maupun kwitansi. Tahap Ketiga, transaksi yang timbul dari Desa kemudian dibukukan, setelah anggaran dan pendapatan belanja Desa di sahkan, kemudian dilaksanakan yang akan dibukukan oleh bendahara Desa dengan membuat Buku Kas Umum, Buku Kas Harian Pembantu, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank Dan Neraca Kas. Tahap Keempat, pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Sedangkan menurut (IAI-KASP, 2015:12-13) “tahap siklus akuntansi Desa yaitu:

- a. Tahap Pencatatan  
Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari buktibukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.
- b. Tahap Penggolongan  
Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.
- c. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

d. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini :

- a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa  
Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.”

## 8. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi siskeudes ini ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kemendagri atau perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan Aplikasi Siskeudes dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah perintah daerah yang bersangkutan.

Di dalam aplikasi Siskeudes ini terdapat data entri, dimana secara umum menu data entri merupakan menu yang digunakan oleh pemerintah desa. Menu data entri dibagi dalam 4 kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa. Pengelompokan menu data entri dimaksud terdiri dari:

- a. Modul - Perencanaan, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk merekam Data Umum Desa, RPJMDesa dan RKPDesa.
- b. Modul – Penganggaran, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan prosedur penyusunan anggaran dengan output utama APBDesa dan Penjabaran APBDesa.
- c. Modul – Penatausahaan, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan anggaran APBDesa yang meliputi pengajuan SPP, pencairan dan pertanggungjawaban. Output utama menu ini adalah buku-buku penatausahaan keuangan desa seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Buku Kas Umum-Tunai, Buku Bank dan Buku Pajak.
- d. Modul – Pembukuan, Merupakan kelompok menu dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

## **9. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa**

### **a. Sistem Pencatatan**

Menurut Erlina Rasdianto (2013:4) dalam proses pencatatan yang merupakan salah satu proses akuntansi, akuntansi menggunakan sistem



pencatatan. Menurut Erlina Rasdianto (2013:4) Ada tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu:

**1. Single Entry**

Sistem pencatatan single entry disebut dengan sistem tata buku tunggal. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat ditambahkannya kas akan dicatat disisi penerimaan di dalam Buku Kas Umum (BKU) sedangkan transaksi yang berakibat kurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran di dalam Buku Kas Umum.

**2. Double Entry**

Sistem pencatatan double entry disebut sistem tata buku berpasangan. Pencatatan transaksi ekonomi dua kali, dalam arti, bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit. Setiap Pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem double entry sering disebut dengan istilah menjurnal.

**3. Triple Entry**

Sistem pencatatan triple entry adalah sistem pencatatan yang menggunakan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada double entry. Dengan adanya pencatatan ini maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di anggaran pendapatan belanja daerah. Pencatatan dengan sistem triple entry ini dilaksanakan saat pencatatan double entry dilaksanakan, maka sub bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran.

**b. Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa**

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012: 46-51) adalah sebagai berikut :

1) Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis kas merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.

2) Basis Akrual (*Accrual Basis*)

Transaksi dicatat pada saat terjadinya tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual digunakan untuk pengukuran asset, kewajiban dan ekuitas dana.

3) Basis Kas Miodifikasian (*Modified Cash Basis*)



Basis ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4) Basis Akrual Modikasian (*Modified Accrual Basis*)

Basis ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan.

## 10. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI-KASP, 2015 : 2-5) menyebutkan bahwa “pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

### 1) Perencanaan

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh Kepala desa, dan Dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal ini Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dengan dilakukannya pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- f. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

- g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah :
- 1) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
  - 2) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
  - 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
  - 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.

## 2) Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui **rekening kas desa**.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh **bukti yang lengkap dan sah**.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada **jumlah tertentu** dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.  
Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- f. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- g. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

## 3) Penatausahaan

Bendahara desa wajib :

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

**4) Pelaporan**

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi :

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

**5) Pertanggungjawaban**

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati /Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi :

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
  - 1. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - 2. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
  - 3. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

**6) Pembinaan dan Pengawasan**

- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.”

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 1 Keuangan Desa adalah:

“Semua hal dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.”



## 11. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut David Wijaya (2018) keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas pengelolaan keuangan desa sesuai permendagri Nomor 113 Tahun 2014, antara lain :

- 1) **Transparan**, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) **Akuntabel**, yaitu perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) **Partisipatif**, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 4) **Tertib dan disiplin anggaran**, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.  
Ada tiga disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain sebagai berikut :
  1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasio yang mampu dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
  2. Pengeluaran harus didukung oleh kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/Perubahan APBDesa.

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

## 12. Tujuan Laporan Keuangan



Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2014:09) tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

Menurut Rudianto (2012:20) tujuan penyajian laporan keuangan adalah :

- 1) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.
- 2) Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi memperoleh laba.
- 3) Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba dimasa depan.
- 4) Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- 5) Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan investasi.
- 6) Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pengguna laporan, seperti informasi mengenai kebijaksanaan akuntansi yang dianut perusahaan.

## **B. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, belum sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP Tahun 2015



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangkinang Seberang, objek dari penelitian ini adalah Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang.

#### B. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang penulis kumpulkan berdasarkan dari catatan-catatan dan dokumen yang diberikan oleh Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang adalah Data Primer dan Sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pengurus Desa Pulau Lawas, mengenai sejarah berdirinya Desa Pulau Lawas, Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan data yang telah di susun Desa Pulau Lawas dalam bentuk yang sudah jadi seperti Laporan Realisasi Anggaran Desa.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode Wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara langsung dan mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang diteliti meliputi aktivitas Desa Pulau Lawas, sejarah berkembangnya Desa Pulau Lawas, kebijakan operasional serta kebijakan dibidang akuntansi.
2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data seperti laporan keuangan, dan sejarah perusahaan.

3. Observasi, data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui teknik observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian. Peneliti ikut terlibat dalam kegiatan objek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Selanjutnya dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menganalisa dengan menelaah dan membandingkan dengan berbagai teori relevan yang berkaitan dengan pembahasan pemecahan pokok permasalahan. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DESA PULAU LAWAS

#### A. Sejarah Singkat Desa Pulau Lawas

Desa Pulau Lawas adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Bangkinang Seberang. Pada zaman dahulu Desa Pulau Lawas merupakan hutan belukar, sejalan dengan perkembangan penduduk pada waktu itu, sesuai dengan adat istiadat setempat wilayah ini dikuasai oleh pucuk adat (ninik mamak) yang bergelar Datuk Rajo Deko. Ninik mamak (Datuk Rajo Deko) membawa anak kemenakannya untuk membuka perkampungan baru yang sekarang disebut Desa Pulau Lawas. Datuk Rajo Deko ini membawahi 4 (empat) persukuan yaitu:

1. Suku Melayu Datuk Tuo
2. Suku Melayu Datuk Mudo
3. Suku Datuk Patio
4. Suku Haji Besar Melayu

Pada waktu itu perkampungan baru ini belum memiliki nama, untuk memberi nama kampung ini dilaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh cerdik pandai, alim ulama dan ninik mamak yang dihadiri oleh :

1. Bukhori
2. Mansyur
3. Ahmad BKN
4. Syaidan
5. Muhammad Saleh

## 6. Abbas BA

Dalam musyawarah tersebut diambil satu keputusan dengan nama desa “Pulau Lawas” dengan catatan pada waktu itu terdiri dari 3 (tiga) Kampung/Dusun yaitu :

1. Kampung Godang
2. Kampung Deling
3. Pulau Lawas

Yang sampai sekarang disebut Dusun Kampung Godang, Dusun Kampung Deling dan Dusun Pulau Lawas. Sejalan dengan hal tersebut diatas untuk member nama desa diambil dari nama Dusun Pulau Lawas yaitu Desa Pulau Lawas, wali mudanya pada saat itu diambil dari tokoh masyarakat Dusun Kampung Deling yaitu Peltusyaidan, dan tempat kedudukan (kantor wali mudanya) berkedudukan di Dusun Kampung Godang sampai saat sekarang.

Sesuai dengan perkembangan zaman pada tahun 1988 ketiga Dusun tersebut diatas dijadikan sebuah Desa dengan nama Desa Pulau Lawas dan pimpinannya disebut Kepala Desa Pulau Lawas yang sampai pada saat ini telah berganti 9 (Sembilan) kali Kepala Desanya sebagai berikut :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Peltusyaidan   | Tahun 1970 s/d Tahun 1988                |
| 2. Zulkifli       | Pjs. Tahun 1988 s/d Tahun 1989           |
| 3. Hasan Usman    | Tgl 15 Juni 1989 s/d 14 April 1999       |
| 4. Azhari, S.Sos  | Tgl 15 April 1999 s/d 4 Desember 2007    |
| 5. Kamaruddin Zen | Tgl 5 Desember 2007 s/d 09 November 2009 |

6. Murniati Pjs Tgl 10 November 2009 s/d 15 Oktober 2010
7. Nazaruddin Tgl 16 Oktober 2010 s/d 16 Oktober 2016
8. Juprizal Pj. Tgl 17 Oktober 2016 s/d 17 April 2017
9. H, Dasril,S.Sos Pj. Tgl 18 April 2017 s/d 27 Desember 2018
10. Andri Nuras.SH Tgl 28 Desember 2018 Sampai Sekarang

#### **B. Kondisi Geografis**

Desa Pulau Lawas masuk wilayah Kecamatan Bangkinang Seberang. Dengan luas wilayah 875 Ha, dimana 85% berupa daratan yang bertopografi dataran, dan 15% dataran dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan.

Iklim Desa Pulau Lawas sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang.

Desa Pulau Lawas merupakan salah satu desa dari 9 desa/kelurahan diwilayah Kecamatan Bangkinang Seberang.

Jarak Desa Pulau Lawas ke Ibukota Kecamatan 1,5 Km dengan waktu tempuh 5 menit, jarak dengan Ibukota Kabupaten 5 Km dengan waktu tempuh 30 menit dan dengan Ibukota Provinsi 60 Km dengan waktu tempuh 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan umum dan dengan kemudahan sarana transportasi umum yang dapat ditemui tiap hari.

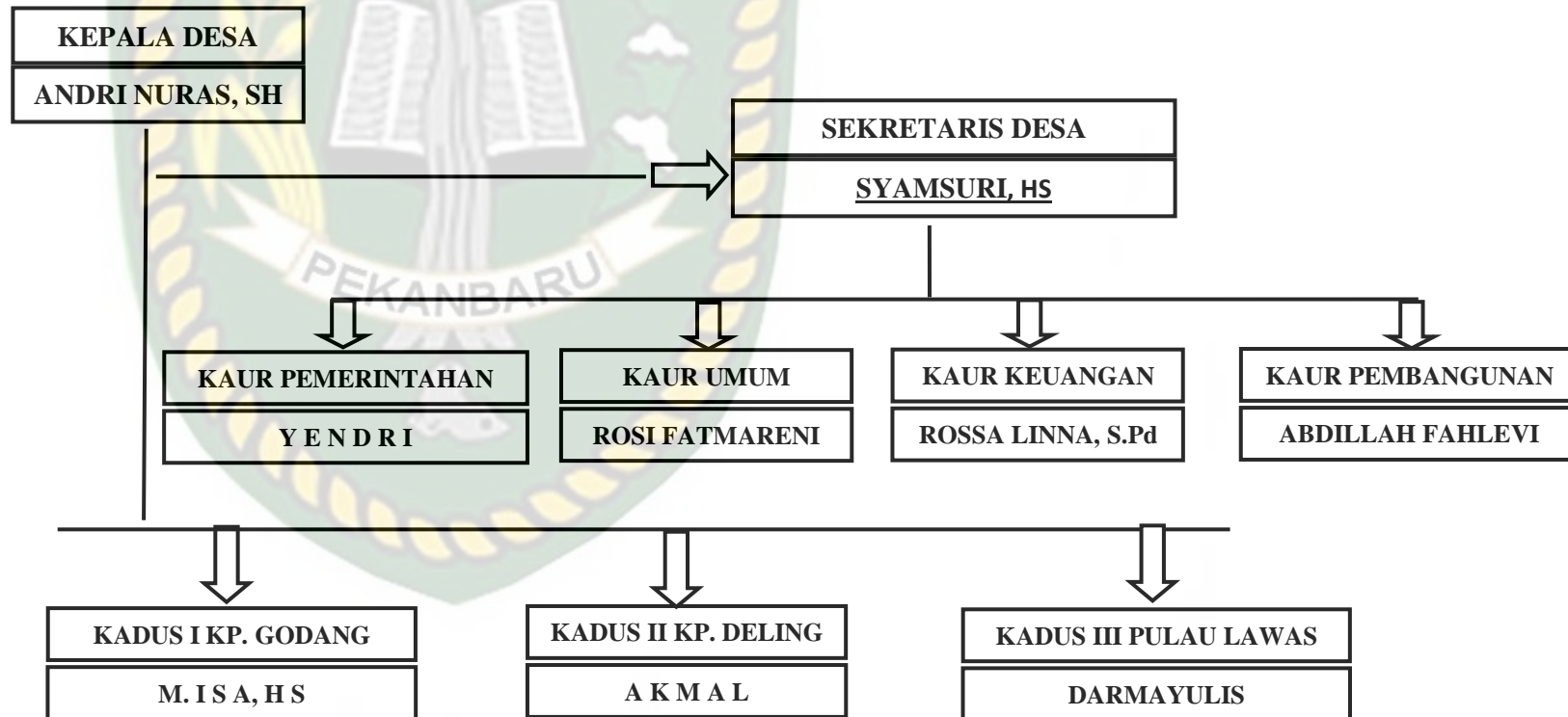
### C. STRUKTUR ORGANISASI DESA PULAU LAWAS

Struktur organisasi Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar terdiri dari kepala Desa Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan Serta 3 Kepala Dusun Untuk mengetahui struktur organisasi Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel IV.I.





**TABEL IV.1**  
**STRUKTUR DESA PULAU LAWAS**  
**KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR**



Sumber : Desa Pulau Lawas Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Seberang

## **D. Visi dan Misi Desa Pulau Lawas**

### **1. Visi**

“Terwujudnya Desa Pulau Lawas Sebagai Desa Swasembada Pangan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Agamis Tahun 2021.”

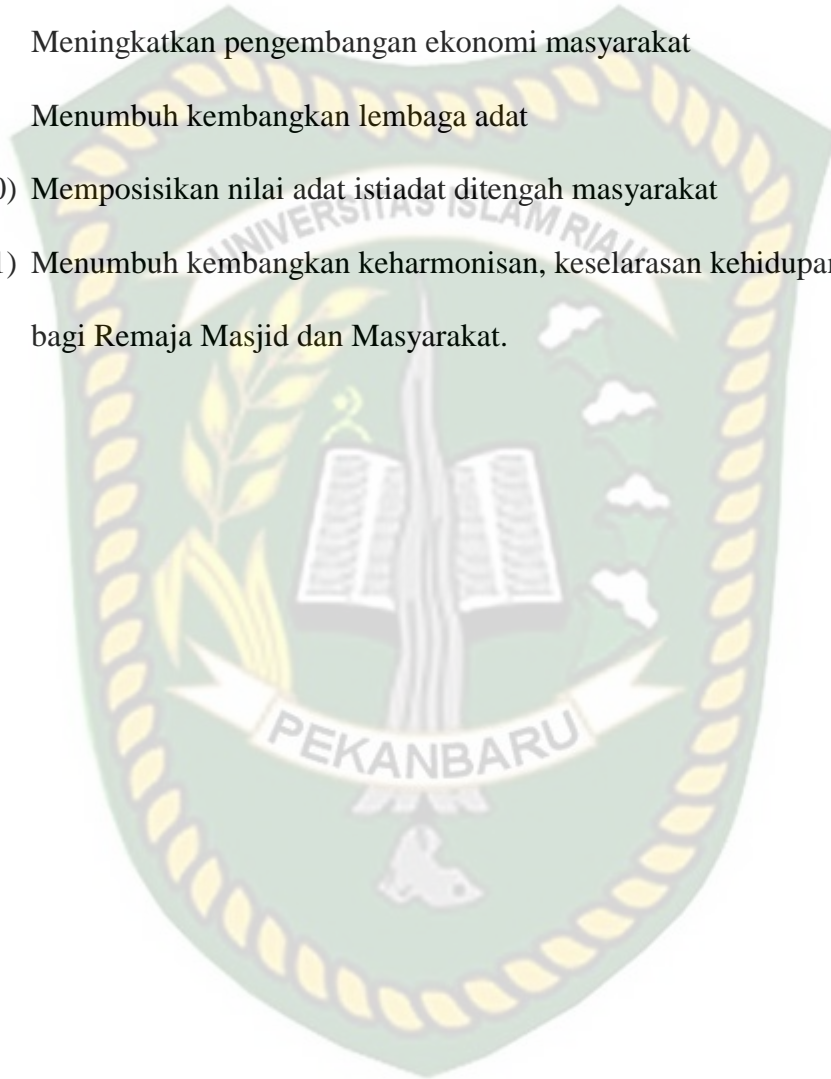
### **2. Misi**

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu persyaratan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut.

Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi yang kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Pulau Lawas sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi desa Pulau Lawas adalah:

- 1) Membangun masyarakat yang beragama, bermatabat, dan sejahtera
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat dari aspek social, ekonomi, budaya local, dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
- 4) Mensejajarkan keteringgalan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup desa di lingkungan Kecamatan Bangkinang Seberang

- 5) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah desa yang responsif, transparansi, partisipatif dan profesional.
- 6) Perbaikan dan peningkatan sarana pelayanan kesehatan dan umum
- 7) Memberdayakan anak dan remaja usia produktif
- 8) Meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat
- 9) Menumbuh kembangkan lembaga adat
- 10) Memposisikan nilai adat istiadat ditengah masyarakat
- 11) Menumbuh kembangkan keharmonisan, keselarasan kehidupan beragama bagi Remaja Masjid dan Masyarakat.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar akan diuraikan pada bab ini. Berdasarkan masalah yang dikemukakan pada bab I dan dengan podoman teoritis yang relevan seperti yang diuraikan pada bab II, maka penulis akan mencoba menganalisis mengenai akuntansi keuangan yang telah diterapkan pada Desa Pulau Lawas, yaitu sebagai berikut:

#### A. Dasar Pencatatan

Dalam dasar pengakuan transaksi yang terjadi pada Desa Pulau Lawas menggunakan basis kas dimana pencatatan dilakukan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.

Sedangkan dalam dasar pencatatan transaksi yang digunakan Desa Pulau Lawas berdasarkan pada pencatatan single entry, dimana pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali.

#### B. Proses Akuntansi Desa Pulau Lawas

Proses akuntansi yang dilakukan pada desa pulau lawas ini sudah menggunakan system yang terkomputerisasi yaitu menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Proses akuntansi keuangan Desa Pulau Lawas dimulai dari pengumpulan dan menganalisis bukti-bukti transaksi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia Komptemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP.2015), tahapan proses akuntansi sebagai berikut:



## 1. Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan Desa Pulau Lawas yaitu tahap pencatatan. Setelah terjadinya transaksi dan timbulnya bukti transaksi, Desa Pulau Lawas harus melakukan pencatatan berupa penyusunan Buku Kas Umum yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit. Buku Kas Umum yang digunakan oleh Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

### a. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit. Setelah semua transaksi dilakukan, untuk tahap pertama perlu mencatat pada buku kas umum, setelah itu di catat di pembukuan masing-masing. Penyajian Buku Kas Umum Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar telah sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Format Buku Kas Umum Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar dapat dilihat pada table V.1

**TABEL V.1**  
**Buku Kas Umum**  
**Desa Pulau Lawas**  
**Tahun Anggaran 2018**

No	Tgl	Rek	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30/04/2018		Kas dibendahara desa	67.650.000	0,00	0001/CHE K/15.01/2018	0,00	67.500.000
2	30/04/2018		Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	0,00	35.850.000	0001/SPP/15.01/2018	35.850.000	31.800.000

Lanjutan tabel V.1

No	Tgl	Rek	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	30/04/2018		Tunjangan BPD dan Anggota	0,00	16.800.000	0002/SPP/15.01/2018	52.650.000	15.000.000
4	30/03/2018		Insentif ketua RT/RW	0,00	15.000.000	0003/SPP/15.01/2018	67.650.000	0,00

**Sumber:** Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar

## 2. Tahap Penggolongan

Setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi tahap selanjutnya adalah tahap penggolongan. Pada tahap ini setelah dilakukannya pencatatan transaksi pada Buku Kas Umum, selanjutnya transaksi dikelompokkan ke dalam buku besar dan buku pembantu. Buku pembantu yang digunakan desa ini adalah Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank Desa dan Buku Kas Pembantu Kegiatan.

### a. Buku Besar

Proses akuntansi yang dilakukan Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang seberang Kabupaten Kampar belum sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, karena Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar belum menyajikan buku besar. Dimana seharusnya semua transaksi yang dicatat pada buku kas umum dicatat ke dalam Buku Besar dan Buku Besar Pembantu. Format buku besar dan buku besar pembantu yang harus di buat oleh bendahara desa pulau lawas adalah sebagai berikut :

**Tabel V.2**  
**Buku Besar**  
**Tahun Anggaran 2018**

**Nama Akun : Pendapatan Transfer**

**No. Akun: 4200**

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
30/04/2019	Penerimaan Alokasi Dana Desa			67.650.000		67.650.000
<b>TOTAL</b>						67.650.000

Sumber : Desa data olahan penulis 2019

**Tabel V.3**  
**Buku Besar Pembantu**  
**Tahun Anggaran 2018**

**Nama Akun : Alokasi Dana Desa**

**No. Akun: 4230**

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
30/04/2019	Transfer Alokasi Dana Desa Triwulan I Tahun 2018			67.650.000		67.650.000
<b>TOTAL</b>						67.650.000

Sumber : Desa data olahan penulis 2019

**Tabel V.4**  
**Buku Besar**  
**Tahun Anggaran 2018**

**Nama Akun : Penghasilan Tetap & Tunjangan**

**No. Akun: 5110**

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
30/04/2019	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		35.850.000		35.850.000	
30/04/2019	Tunjangan BPD dan Anggota		16.800.000		16.800.000	
<b>TOTAL</b>					52.650.000	

Sumber : Desa data olahan penulis 2019

**Tabel V.5**  
**Buku Besar Pembantu**  
**Tahun Anggaran 2018**

**Nama Akun : Belanja Pegawai**

**No. Akun: 5111**

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
30/04/2019	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		35.850.000		35.850.000	
30/04/2019	Tunjangan BPD dan Anggota		16.800.000		16.800.000	
<b>TOTAL</b>					52.650.000	

Sumber : Desa data olahan penulis 2019

### b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum yang berhubungan dengan pajak baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Penyajian Buku Kas Pembantu Pajak Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar telah sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Format Buku Kas Pembantu Pajak Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar dapat dilihat pada table V.6

**TABEL V.6**  
**BUKU KAS PEMBANTU PAJAK**  
**DESA PULAU LAWAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Tgl	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	06/06/2018	00025/KWT/15.01/2018			
		Belanja ATK Kantor desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	67.282	0,00	67.282
		Potongan Pajak PPN Pusat	448.546	0,00	515.828
2	06/06/2018	00031/KWT/15.01/2018			
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
		Potongan Pajak PHR	285.000	0,00	800.828
3	06/06/2018	00051/KWT/15.02/3028			
		Belanja Modal Mesin Rumput			
		Potongan Pajak PPN Pusat	227.273	0,00	1.028.101
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091	0,00	1.062.192
<b>Jumlah</b>			21.712.402	0,00	21.712.402

**Sumber:** Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar



### c. Buku Bank Desa

Buku bank desa digunakan untuk membantu kas umum yang berhubungan dengan uang bank. Penyajian Buku Bank Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar telah sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Format Buku Bank Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar dapat dilihat pada table V.7

**TABEL V.7**  
**BUKU BANK**  
**DESA PULAU LAWAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Tgl	Uraian Transaksi	No Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pjk (Rp)	B. Adm (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	27/02/2018	Slipa dana desa tahun anggaran 2017	0001/TBP/1 5.01/2 018	220.552.770	0,00	0,00	0	0,00	220.553.770
2	27/04/2018	Alokasi dana desa triwulan I tahun 2018	0002/TBP/1 5.01/2 018	67.650.000	0,00	0,00	0	0,00	288.202.770
<b>Total Transaksi Bulan Ini</b>				1.439.938.270	0,00	1.229.063.00	0	0,00	-
<b>Total Transaksi Kumulatif</b>				1.434.928.270	0,00	1.229.063.00	0	0,00	205.865.270

**Sumber:** Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar

#### d. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Buku kas pembantu kegiatan digunakan untuk mencatat transaksi pemasukan ataupun pengeluaran yang berhubungan dengan kas saja. Penyajian Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar telah sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Format Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar dapat dilihat pada table V.8

**TABEL V.8**  
**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**DESA PULAU LAWAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**  
**2. Kegiatan : 01.01. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan**

No	Tgl	Uraian	Penerimaan		No. Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian Ke Bendahara	Saldo Kas
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Blnja Brng & Jasa	Blnja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30/04/2018	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.850.000,00	0,00	0001/SPP/15.01/2018	0,00	0,00	0,00	35.850.000,00
2	06/06/2018	Penghasilan tetap Kepala Desa	42.100.000,00	0,00	0004/SPP/15.01/2018	0,00	0,00	0,00	77.950.000,00

1. Bidang : 02 Pelaksanaan Pembangunan Desa  
 2. Kegiatan : 02.02. Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi

No	Tgl	Uraian	Penerimaan		No. Bukti	Pengeluaran		Jmlh Pengembalian Ke Bendahara	Saldo Kas
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Blnj Brng & Jasa	Blnj Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07/06/2018	Panjar I Pembangunan Drainase Dusun Pulau Lawas	20.815.000	0	0016/S PP/15.01/2018	0	0	0	20.815.000
2	07/06/18	Panjar I Pembangunan Drainase Dusun Pulau Lawas 107 M	22.257.000	0	0017/S PP/15.01/2018	0	0	0	43.072.000
3	07/06/18	Panjar I Pembangunan Drainase Dusun Pulau Lawas 107 M	10.433.000	0	0018/S PP/15.01/2018	0	0	0	53.505.000

1. Bidang : 03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
 2. Kegiatan : 03.01. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

No	Tgl	Uraian	Penerimaan		No. Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian Ke Bendahara	Saldo Kas
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Blnj Brng & Jasa	Blnj Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06/06/2018	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	1.800.000	0	0012/S PP/15.01/2018	0	0	0	1.800.000
2	31/12/2018	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	1.800.000	0	0054/S PP/15.01/2018	0	0	0	3.600.000
3	06/06/2018	Operasional Ketua Linmas Desa	0	0	00056/KWT/15.01/2018	600.000	0	0	3.000.000

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Kegiatan : 04.02. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat

No	Tgl	Uraian	Penerimaan		No. Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian Ke Bendahara	Saldo Kas
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Blnj Brng & Jasa	Blnj Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30/6/16	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	2.200.000	0	0010/S PP/19.0 7/2016	0	0	0	2.200.000
2	30/6/16	Blnj. ATK	0	0	00035/KWT/1 9.07/16	552.400	0	0	1.647.600
3	30/6/16	Belanja Foto Copy	0	0	00036/KWT/1 9.07/16	147.600	0	0	1.500.000

**Sumber:** Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar

### 3. Tahap Pengikhtisaran

Setelah seluruh transaksi sudah dicatat pada buku kas umum dan buku besar tahap selanjutnya adalah tahap pengikhtisaran. Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan neraca lajur. Tahap ini memudahkan proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

#### a. Neraca Saldo

Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang seberang Kabutapen Kampar belum sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, karena Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar belum menyajikan Neraca Saldo. Dimana seharusnya dalam IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, sebelum membuat laporan keuangan Bendahara Desa Pulau Lawas Kecamatan bangkinang Seberang Kabupaten Kampar harus membuat Neraca Saldo terlebih dahulu. Karena dengan



dibuatnya neraca saldo maka akan memudahkan bendahara dalam membuat penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Format Neraca Saldo yang harus di buat oleh bendahara desa pulau lawas adalah sebagai berikut :

**Tabel V.9**  
**Neraca Saldo**  
**Tahun Anggaran 2018**

Kode Akun	Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1110 1111 1112	KasDesa : a. Rekening Kas Desa b. Uang Kas Di bendahara Desa	242.458.060	
1120 1121	Investasi Jangka Pendek : a. Deposito		
1130 1131 1132	Piutang : a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung		
1141 1141 1142	Persediaan : a. Kertas Segel b. Meterai		
1200 1221	Investasi Jangka Panjang : a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360	Aset Tetap : a. Tanah b. Peralatan dan Mesin c. Gedung dan Bangunan d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan e. Aset Tetap Lainnya f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	60.883.900 23.722.000 990.679.900	
1400	Dana Cadangan		
1500	Aset Tidak Lancar Lainnya		
2100 2110 2120 2130	Kewajiban Jangka Pendek : a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga b. Utang Bunga c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
2200 2210	Kewajiban Jangka Panjang a. Utang Dalam Negeri		
4100 4110 4120 4130	Pendapatan Asli Desa a. Hasil Usaha b. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
4200 4210 4220 4230 4241 4242	Pendapatan Transfer a. Dana Desa b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota c. Alokasi Dana Desa d. Bantuan Provinsi Bantuan Kabupaten/-Kota		682.872.000 27.265.500 404.238.000 100.000.000

Lanjutan tabel V.9

Kode Akun	Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
4300 4310 4320	Pendapatan Lain-lain a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat b. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah		
5100 5110 5120 5130 5140	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan b. Operasional Perkantoran c. Operasional BPD d. Operasional RT/RW e. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa f. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa g. Kegiatan Pengadaan Barang Inventaris Kantor	153.000.000 74.859.100 71.200.000 60.000.000 3.045.000 9.000.000 41.383.900	
5200 5210 5220	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : a. Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana b. Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana c. Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana d. Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana e. Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	331.089.600 11.000.000 8.000.000 33.031.450 79.961.160	
5300 5310	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: a. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban b. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan olahraga c. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK d. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	3.600.000 4.000.000 4.000.000 40.000.000	
5400 5410	Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat : a. Pengelolaan Kegiatan Kegiatan Pelayanan Pendidikan b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat c. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	76.800.000 4.000.000 20.500.000	
5500 5510	Belanja Bidang Tak Terduga: a. Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
6100 6110 6120 6130	Penerimaan Pembiayaan : a. SiLPA. b. Pencairan Dana Cadangan c. Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		220.552.770
6200 6210 6220	Pengeluaran Pembiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan b. Penyertaan Modal Desa	164.000.000	

Sumber : Desa data olahan penulis 2019

## b. Neraca Lajur

Kertas kerja atau neraca lajur dibuat untuk memudahkan dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Angka yang disajikan pada Neraca Lajur diambil dari Neraca Saldo seluruh Buku Besar dengan memperhatikan koreksi yang kemungkinan dilakukan atas penyajian angka-angka tersebut. Format Neraca Lajur yang harus dibuat oleh Bendahara Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

**Tabel V.10**  
**Neraca Lajur**  
**Tahun Anggaran 2018**

Nama Akun	Nama Akun	Neraca Saldo		Penyesuaian		Laporan Realisasi APBDesa		Laporan kekayaan Desa	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
1110 1111 1112	KasDesa : a. Rekening Kas Desa b. Uang Kas Di bendahara Desa	242.458.060						242.458.060	
1120 1121	Investasi Jangka Pendek : a. Deposito								
1130 1131 1132	Piutang : a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung								
1141 1141 1142	Persediaan : a. Kertas Segel b. Meterai								
1200 1221	Investasi Jangka Panjang : a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa								
1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360	Aset Tetap : a. Tanah b. Peralatan dan Mesin c. Gedung dan Bangunan d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan e. Aset Tetap Lainnya f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	60.883.900 23.722.000 990.679.900						60.883.900 23.722.000 990.679.900	
1400	Dana Cadangan								
1500	Aset Tidak Lancar Lainnya								
2100 2110 2120 2130	Kewajiban Jangka Pendek : a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga b. Utang Bunga c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang								
2200 2210	Kewajiban Jangka Panjang a. Utang Dalam Negeri								

Lanjutan tabel V.10

Nama Akun	Nama Akun	Neraca Saldo		Penyesuaian		Laporan Realisasi APBDesa		Laporan kekayaan Desa	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
4100	Pendapatan Asli Desa								
4110	a. Hasil Usaha								
4120	b. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong								
4130	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah								
4200	Pendapatan Transfer								
4210	a. Dana Desa		682.872.000				682.872.000		
4220	b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota		27.265.500				27.265.500		
4230	c. Alokasi Dana Desa		404.238.000				404.238.000		
4241	d. Bantuan Provinsi		100.000.000				100.000.000		
4242	e. Bantuan Kabupaten/-Kota								
4300	Pendapatan Lain-lain								
4310	a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat								
4320	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah								
5100	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :	153.000.000					153.000.000		
5110	a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	74.859.100					74.859.100		
5120		71.200.000					71.200.000		
5130	b. Operasional Perkantoran	60.000.000					60.000.000		
5140	c. Operasional BPD	3.045.000					3.045.000		
	d. Operasional RT/RW	9.000.000					9.000.000		
	e. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	41.383.900					41.383.900		
	f. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa								
	g. Kegiatan Pengadaan Barang Inventaris Kantor								
5200	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :	331.089.600					331.089.600		
5210	a. Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	11.000.000					11.000.000		
5220	b. Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	8.000.000					8.000.000		
	c. Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	33.031.450					33.031.450		
	d. Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	79.961.160					79.961.160		
	e. Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana								



Lanjutan tabel V.10

Nama Akun	Nama Akun	Neraca Saldo		Penyesuaian		Laporan Realisasi APBDesa		Laporan kekayaan Desa	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
5300	Belanja Pembinaan kemasyarakatan a. Kegiatan Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban b. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan olahraga c. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK d. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	3.600.000 4.000.000 4.000.000 40.000.000				413.220.000 90.963.897 5.217.000 70.500.000			
5400	Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat : a. Pengelolaan Kegiatan Kegiatan Pelayanan Pendidikan b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat c. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	76.800.000 4.000.000 20.500.000				76.800.000 4.000.000 20.500.000			
5500 5510	Belanja Bidang Tak Terduga: a. Kegiatan Kejadian Luar Biasa								
6100 6110 6120 6130	Penerimaan Pembiayaan : a. SILPA. b. Pencairan Dana Cadangan c. Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		220.552.770				220.552.770		
6200 6210 6220	Pengeluaran Pembiayaan : a. Pembelian Dana Cadangan b. Penyertaan Modal Desa	164.000.000				164.000.000			

Sumber : Desa data olahan penulis 2019

### C. Penyajian Laporan Keuangan

Membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan dasar penyusunan laporan keuangan. Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar telah membuat sesuai dengan standar akuntansi pengelolaan keuangandesas berdasarkan IAI-KASP Tahun 2015 Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi keuangan Desa, yang diantaranya terdiri dari:

### a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Penyajian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar telah sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar dapat dilihat pada table V.11.

**TABEL V.11**  
**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAHAN DESA PULAU LAWAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.2.</b>	<b>Pendaftaran Transfer</b>	<b>1.216.526.000</b>	<b>1.214.375.000</b>	<b>2.150.500</b>
1.2.1.	Dana Desa	682.875.000	682.875.000	0
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.416.000	27.265.500	2.150.000
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	404.238.000	404.238.000	0
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000	100.000.000	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.216.526.000</b>	<b>1.214.375.500</b>	<b>2.150.500</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Desa</b>	<b>1.347.075.450</b>	<b>1.028.470.210</b>	<b>318.605.240</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	232.296.000	220.200.000	12.096.000
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	551.834.131	418.119.410	133.714.721
2.1.3.	Belanja Modal	562.945.319	390.150.800	172.794.519

Lanjutan Tabel V.11

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) ) (Rp)
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.347.075.450</b>	<b>1.028.470.210</b>	<b>318.605.240</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(130.549.450)</b>	<b>(185.905.290)</b>	<b>(316.454.740)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>294.668.450</b>	<b>220.552.770</b>	<b>74.115.680</b>
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	294.668.450	220.552.770	74.115.680
<b>3.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>164.119.000</b>	<b>164.000.000</b>	<b>119.000</b>
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	164.119.000	164.000.000	119.000
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>130.549.450</b>	<b>56.552.770</b>	<b>73.996.680</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>242.458.060</b>	<b>(242.458.060)</b>

Sumber: Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar

#### b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau diperoleh hak lainnya yang sah. Laporan kekayaan milik desa adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan desa pulau lawas mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada periode satu tahun.

Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar jumlah aset yang diperoleh tahun 2017 tidak dilaporkan pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 Adapun contoh aset tetap peralatan dan mesin tahun 2017 adalah sebesar Rp.19.500.000 dan tahun 2018 sebesar Rp.41.383.900 yang seharusnya aset tetap peralatan dan mesin

pada tahun 2018 adalah akumulasi dari aset tetap peralatan dan mesin tahun 2017 dan 2018 menjadi sebesar Rp.60.883.900.

Selain itu dalam mencatat Aset Tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan instalasi Desa pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar tidak membuat akumulasi penyusutan dari aset tetap yang masih memiliki nilai ekonomis. Sehingga aset tetap memiliki nilai yang tinggi, dimana seharusnya aset tetap memiliki nilai yang rendah karena sudah memiliki nilai kurang.

Pada neraca aset tetap peralatan dan mesin tahun 2018 adalah sebesar Rp. 60.883.900, gedung dan bangunan sebesar Rp.23.722.000 dan jalan jaringan dan instalasi sebesar Rp.990.679.900. Dengan umur ekonomis ditaksir 5 tahun (peralatan dan mesin), 10 tahun (gedung dan bangunan), 20 tahun (jalan,jaringan dan instalasi) Dibawah ini merupakan contoh cara menghitung penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus:

- a. Penyusutan untuk peralatan dan mesin

$$\text{Pertahun} \quad : \frac{\text{Rp.60.883.900}}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp.12.176.780}$$

- b. Penyusutan untuk gedung dan bangunan

$$\text{Pertahun} \quad : \frac{\text{Rp.23.722.000}}{10 \text{ Tahun}} = \text{Rp.2.372.200}$$

- c. Penyusutan untuk jalan, jaringan dan instalasi

$$\text{Pertahun} \quad : \frac{\text{Rp.990.679.900}}{20 \text{ Tahun}} = \text{Rp.49.533.995}$$



Tabel V.12 dibawah ini merupakan Laporan Kekayaan Milik Desa sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa:

**Tabel V.12**  
**Laporan Kekayaan Milik Desa**  
**Anggaran 2018**

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
1. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
01.Kas Desa	242.458.060	199.169.750
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
02.Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
03.Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR	242.458.060	199.169.750
B. ASET TIDAK LANCAR		
01. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
02. Aset Tetap		
- Tanah	41.383.900	29.207.120
- Peralatan dan Mesin	(12.176.780)	19.500.000
- Akm penyusutan peralatan dan mesin	23.722.000	21.349.800
- Gedung dan bangunan	(2.372.200)	23.722.000
- Akm penyusutan gedung dan bangunan	990.679.900	941.145.905
- Jalan, Jaringan dan Instalasi	(49.533.995)	641.912.000
- Akm Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
03. Dana Cadangan		
a. Dana Cadangan		
b. Aset Tidak Lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	991.702.825	685.134.000
JUMLAH ASET (A+B)	1.234.160.885	884.303.750
I. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)	1.234.160.885	884.303.750

Sumber : Desa data olahan penulis 2019

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

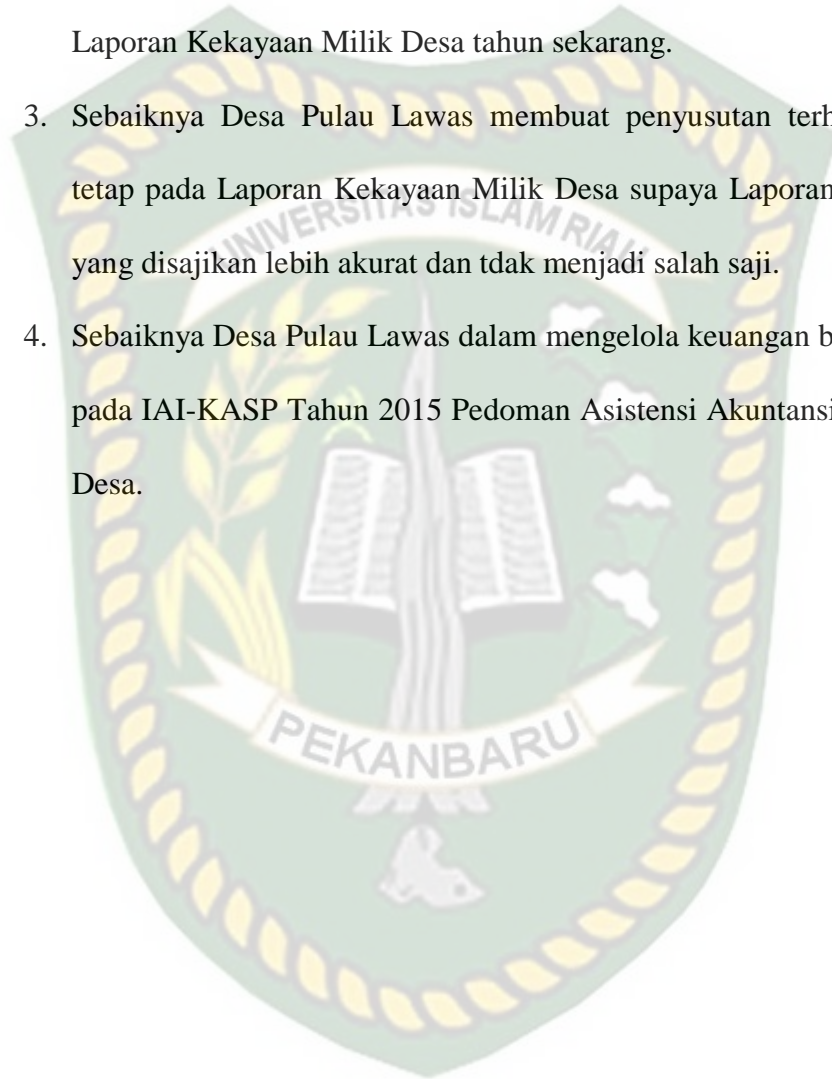
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntansi pada Desa Pulau Lawas tidak berorientasi terhadap laba (non profit), pelayanan diberikan untuk kepentingan masyarakat.
2. Dalam dasar pencatatan Desa Pulau Lawas menggunakan cash basis. Yaitu setiap transaksi dicatat pada saat menerima maupun pengeluaran kas.
3. Desa Pulau Lawas ini belum menyajikan Buku Besar, Neraca Saldo dan Neraca Lajur.
4. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Desa Pulau Lawas tidak melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset tetap.
5. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Desa Pulau Lawas jumlah aset yang diperoleh tahun 2017 tidak dilaporkan pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018.
6. Penerapan akuntansi pada Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP Tahun 2015.

#### B. Saran

Setelah melakukan penelitian, adapun saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut:

1. Sebaiknya Desa Pulau Lawas membuat buku besar, neraca saldo dan neraca lajur.
2. Sebaiknya Desa Pulau Lawas pada Laporan Kekayaan Milik Desa melaporkan jumlah aset yang diperoleh tahun sebelumnya pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun sekarang.
3. Sebaiknya Desa Pulau Lawas membuat penyusutan terhadap asset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa supaya Laporan Keuangan yang disajikan lebih akurat dan tidak menjadi salah saji.
4. Sebaiknya Desa Pulau Lawas dalam mengelola keuangan berpedoman pada IAI-KASP Tahun 2015 Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bahtiar dkk. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Erlina, Rasdianto. 2013. Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual. Penerbit: Brama Ardian.
- Halim, Abdul dan Syam Muhammad. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Hamzah, Ardi. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris. Penerbit Pustaka Jawa Timur.
- Nurcholis, Hanif, 2011. "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". Penerbit Erlangga
- Pura, Rahman. 2013. Pengantar Akuntansi I Pendekatan Siklus Akuntansi. Jakarta: Erlangga.
- Reeve, James S., Warren, dkk. 2012. Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Rudianto, 2008, Pengantar Akuntansi, Erlangga, Jakarta.
- Ulina, Martha. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Dana Desa Pada Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, Pekanbaru: Universitas Islam Riau
- V. Wiratna Sujarweni, 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wijaya, David. 2018. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Gaya Media
- Wijaya, Purba Andi. 2014. Akuntansi Perbankan. Penerbit CV. Bin karya Utama
- BPKP, 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Tim Penyusun: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Desa
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Kompartemen ASP : Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa No 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.



Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah,

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

